

Analisis Sistem dan Kebijakan Israel dalam Pendidikan Agama Islam Arab-Muslim

Abdul Malik Aripin¹, Komarudin Sassi²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Sumatera Selatan
malikarifin346@gmail.com¹, sassikomarudin@yahoo.com²

ABSTRACT

This article analyzes Israel's education system and policies in the context of Arab-Muslim Islamic education. This research examines how the Israel's education system and policies influence the development of Islamic education for the Arab-Muslim community and examines the impact of the education system on identity, values and understanding of religion in the Arab-Muslim community in the state of Israel. This study uses a qualitative-descriptive method through analysis of various literary sources and research reports as well as accredited national and international journals, especially those published in the period 2019 to 2024. The results show the need for dialogue and integrative collaboration between various stakeholders in minimizing inequality in policies in the four existing structures and types of schools fairly and wisely. With an inclusive approach, cross-group collaboration, and fair and wise government policies, it is possible that the existence of Arab-Muslim Islamic education has the potential to strengthen social tolerance and the development of Israel's glorious civilization.

Keywords: education system, Israel's education policy, pai, Arab-Muslim

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis sistem dan kebijakan pendidikan Israel dalam konteks pendidikan Islam Arab-Muslim. Penelitian ini meneliti bagaimana sistem pendidikan dan kebijakan Israel memengaruhi pengembangan pendidikan Islam bagi komunitas Arab-Muslim serta mengkaji dampak dari sistem pendidikan terhadap identitas, nilai-nilai, dan pemahaman agama dalam komunitas Arab-Muslim di negara Israel. Studi ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui analisis berbagai sumber kepustakaan dan laporan penelitian serta jurnal nasional dan internasional terakreditasi, terutama yang terpublikasi dalam rentang waktu 2019 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan perlunya dialog dan kolaborasi-integratif antar berbagai *stakeholders* dalam meminimalisir ketimpangan terhadap kebijakan pada keempat struktur dan jenis sekolah yang ada secara adil dan bijaksana. Dengan pendekatan inklusif, kolaborasi lintas kelompok, dan kebijakan pemerintah yang adil dan bijaksana, dimungkinkan eksistensi pendidikan Islam Arab-Muslim memiliki potensi dalam memperkuat toleransi sosial, dan perkembangan peradaban gemilang Israel.

Kata Kunci: sistem pendidikan, kebijakan pendidikan Israel, pai, Arab-Muslim

PENDAHULUAN

Perjanjian fundamental antara Takhta Suci dan Negara Israel pada tahun 1993 merupakan perjanjian bilateral yang ditandatangani oleh Takhta Suci dan Israel yang menjadi dasar terjalinnya hubungan diplomatik dan kerja sama antara 4.444 negara (Holy See and the State of Israel," 1993). Pembahasan isu-isu terkait

hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan beragama, tidak lepas dari perjanjian antara Israel dan Takhta Suci. Negara Israel setuju untuk melindungi kebebasan beragama dan hak-hak Gereja Katolik di Israel dan berkomitmen untuk bekerja sama memerangi segala bentuk anti semitisme, termasuk segala bentuk rasisme dan intoleransi beragama (Joseph S. Spoerl: 1993).

Sejak tahun 2008, telah terjadi serangan di Israel yang dilakukan oleh ekstremis Yahudi terhadap warga Arab Israel, termasuk Muslim, Kristen, dan Katolik, serta warga Palestina. Serangan itu dipicu oleh ekstremis Yahudi yang tidak menerima pembatasan pemerintah Israel terhadap pemukiman Yahudi di tanah Palestina. Serangan tersebut tidak hanya menargetkan gereja tetapi juga masjid dan rumah serta properti warga Arab. Serangan tersebut diwarnai dengan slogan-slogan rasis dan intoleransi beragama, serta penghancuran sejumlah tempat ibadah yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara dan menggulingkan pemerintah Israel (Human Rights Watch, 2008). Penerapan kebijakan hukum bangsa Yahudi atau yang disebut dengan Hukum Negara Bangsa Yahudi disahkan oleh Parlemen Israel (*Knesset*) pada tahun 2018. Undang-undang ini menetapkan Israel sebagai "negara-bangsa dari rakyat Yahudi," menegaskan bahwa hak untuk menentukan nasib sendiri di Israel hanya milik orang Yahudi, serta menjadikan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi negara, sementara bahasa Arab diturunkan statusnya menjadi "status khusus". Kritik terhadap pemberlakuan undang-undang ini tidak hanya datang dari Negara Israel sendiri, namun juga dari komunitas internasional (www.bbc.com, 2018).

Di sisi lain, tidak seluruh warga Israel adalah orang Yahudi, sekitar 17,6% dari penduduk Israel adalah orang Arab dan Muslim. Hingga saat ini, lebih dari 161.000 penduduk Israel adalah orang Kristen (Paul Johnson, 1987: 22-40).

Dalam sejarah manusia, muncul fenomena yang disebut "ras super". Salah satunya adalah orang-orang Yahudi (Paul Johnson, 1987). Alkitab juga mengatakan bahwa bangsa Israel sepanjang sejarahnya telah merasakan dirinya sebagai umat pilihan Tuhan. Hal ini sebenarnya merupakan bentuk rendahnya harga diri mereka karena sudah bertahun-tahun menjadi budak rakyat Mesir (Mark S. Smith, 2002). Sebagai ganjarannya, Nabi Musa AS meninggikan harga diri bangsa Israel yang hancur dengan mengatakan bahwa mereka adalah umat pilihan Allah (John Bright, 2000).

Perjalanan panjang bangsa Israel atau Yahudi dimulai sekitar 4.000 tahun yang lalu. Nabi Ibrahim AS dan keturunannya tidak hanya menciptakan sejarah para nabi dan rasul, tetapi juga bangsa yang kita kenal sekarang sebagai bangsa Yahudi. Sejak lahirnya bangsa Yahudi, keturunan Nabi Ibrahim AS telah memelopori fondasi tiga agama besar: Yudaisme, Kristen, dan Islam. Dalam perjalanan mereka melalui *takdir ilahi* mereka (Karen Armstrong, 1993). Nabi Ibrahim AS adalah bapak ketiga agama besar (*Abrahamic Religion*) tersebut. Karenanya, disadari atau tidak sesungguhnya ketiga agama *Abrahamic Religion* itu yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam adalah bersaudara sebab Nabi Musa AS, Isa AS, dan Muhammad SAW berasal dari garis keturunan Ibrahim AS yang sama (Komarudin Sassi & Haramain Azzahra,

2023 : 175). Nabi Ibrahim AS adalah anak seorang pematung patung bernama Azura dari Babilonia. Ibrahim cerdas dan kritis sejak kecil. Ketika ayahnya menyembah patung, Ibrahim menolak ajakan ayahnya dan memberontak terhadap ayahnya dan menghancurkan patung tersebut, sehingga dia dijatuhi hukuman mati di tiang pancang. Dan berkat pertolongan Tuhan, api tersebut tidak membakar Ibrahim (Reza Aslan, 2005).

Konflik tersebut merupakan konflik berusia 100 tahun di mana Israel dan Palestina belum mampu mencapai kesepakatan dalam beberapa isu. Terdapat upaya perundingan perdamaian selama 25 tahun terakhir, namun hingga saat ini konflik tersebut belum terselesaikan, dan diperkirakan tidak akan terselesaikan dalam waktu dekat. Konflik kedua wilayah ini merupakan persoalan kemanusiaan bukan persoalan agama, dan kerugian umat manusia akibat konflik tersebut begitu abadi dan sekaligus sadis di dunia (Rashid Khalidi, 2020). Konflik Palestina-Israel yang sedang berlangsung sekarang telah menelan ribuan korban jiwa, termasuk anak-anak yang meninggal akibat serangan udara Israel di Jalur Gaza.

Perang Palestina – Israel tersebut mengakibatkan korban jiwa, dengan perkiraan kerugian sebesar \$2,1 miliar (World Bank, 2021). Konflik Palestina-Israel mempunyai banyak implikasi bagi dunia internasional, terutama munculnya sikap terhadap Yahudi di negara-negara mayoritas Muslim di seluruh dunia yaitu semakin menguatnya jumlah masyarakat yang mengancam konflik Palestina-Israel (Pew Research Center, 2021). Konflik Palestina menyebabkan keamanan dan darurat politik di kawasan Timur-Tengah. Israel tidak setuju dengan hak diaspora pengungsi Palestina karena negara Israel bisa menjadi minoritas Yahudi. Meskipun solusi ini diklaim sebagai satu-satunya solusi jangka panjang, namun hal ini menimbulkan banyak kesulitan. Akibat liku-liku konflik Palestina-Israel, *Abraham Accords*, sebuah deklarasi politik yang menyerukan perdamaian dan kerja sama antara Israel dan Arab pada sebuah upacara yang diadakan di halaman Selatan Gedung Putih di Washington, DC, dihadiri oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Sheikh Abdullah dari Uni Emirat Arab (UEA) bin Zayed bin Sultan Al Nahyan urusan Luar Negeri, Abdullatif bin Rashid Al Zayani dari kerajaan Bahrain (Bahrain) menandatangani instrumen Tripartit pada 15 September 2020 (U.S. Department of State, 2020).

“Konflik Israel-Palestina merupakan persoalan kompleks yang telah berlangsung lebih dari seabad. Meskipun upaya perundingan damai telah dilakukan selama beberapa dekade, penyelesaian konflik ini tetap belum tercapai. Ketegangan ini memuncak dalam berbagai peristiwa, termasuk perang 11 hari pada 2021 yang mengakibatkan kerugian ekonomi sekitar \$2,1 miliar dan korban jiwa di kedua belah pihak memengaruhi opini global, terutama di negara-negara mayoritas Muslim yang kian menguatkan solidaritas terhadap Palestina. Penolakan Israel terhadap hak kembalinya pengungsi Palestina menjadi salah satu isu utama yang belum terselesaikan, karena adanya kekhawatiran perubahan demografi yang merugikan Israel (www.unocha.org, 2021).

Pada 15 September 2020 *Accords* ditandatangani di Washington, menandai

normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain, dengan mantan Presiden AS Donald Trump hadir sebagai saksi. Kesepakatan ini menunjukkan pada perdamaian, meskipun konflik dasar di Palestina tetap menjadi tantangan besar. Di sisi lain, kekerasan di Palestina telah menimbulkan simpati global dan mengundang perhatian hukum humaniter internasional, yang mengupayakan perlindungan bagi korban perang dan membatasi dampak negatif konflik. Peran negara-negara Muslim dalam mendukung Palestina menguat, dengan seruan global untuk penyelesaian yang adil dan damai (<https://www.oic-oci.org>).

Pada akhir abad ke-19, gerakan nasionalis zionis dikembangkan oleh sekelompok intelektual Yahudi Eropa dengan tujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina. Zionisme didasarkan pada premis bahwa Palestina adalah wilayah eksklusif Yahudi karena Yahudi sudah ada pada zaman Alkitab. Gerakan zionis menggambarkan Palestina sebagai "tanah tanpa rakyat, tanah untuk rakyat yang tidak memiliki tanah" dan para imigran Zionis ke Palestina telah menaklukkan lingkungan yang keras dan meninggalkan gurun tandus pionir yang datang untuk menyuburkan tanah. Gagasan tentang tanah kosong digunakan untuk membenarkan penjajahan zionis, dengan prasangka yang berujung pada *dehumanisasi* masyarakat adat dan *delegitimasi* mereka sebagai masyarakat yang mempunyai hak atas tempat tersebut (Masalha, Nur, 1997). Sejak awal berdirinya, gerakan zionis bertujuan untuk mencari dan memperoleh dukungan dari kekuatan kolonial Eropa sehingga mereka tidak melakukan berbagai cara untuk bisa memperoleh kekuatan yang paling besar untuk mengambil alih palestina.

Adapun dalam konteks pendidikan Islam, sistem dan kebijakan pendidikan Islam di Israel merupakan bagian dari sistem pendidikan negara, dengan beberapa kendala dan keterbatasan, terutama dalam hal otonomi dan sumber daya. Sekolah-sekolah Arab di Israel yang mayoritasnya beragama Islam, mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Israel. Sekolah-sekolah ini mengajarkan agama Islam, bahasa Arab, serta budaya Arab, tetapi juga harus mematuhi kurikulum umum yang menekankan pada bahasa dan sejarah Israel (Sami Adwan, 2001 vol. 45:333-358).

Fenomena ini menciptakan ketegangan, karena masyarakat Arab-Islam menginginkan kurikulum yang lebih sesuai dengan identitas agama dan budaya mereka. Minimnya pendidikan Islam yang lebih mengedepankan perdamaian dan kesejahteraan bagi umat manusia membuat mereka tidak mempedulikan lagi asas kemanusiaan terhadap masyarakat Palestina.

Pendidikan publik di Israel menunjukkan kecenderungan monocultural yang berfokus pada nilai-nilai Yahudi dan nasionalisme, serta kurang mengakomodasi minoritas etnis. Sistem pendidikan Zionis-Yahudi berkembang sejak sebelum Israel merdeka pada 1948. Dengan pendidikan publik yang didesain seakan hanya untuk bangsa Yahudi. Undang-undang Pendidikan Nasional Israel 1953 menetapkan tujuan utama pendidikan berdasarkan nilai-nilai Yahudi, cinta tanah air, kesetiaan pada negara, dan kerja praktik, serta mencakup nilai kebebasan, kesetaraan, dan kemanusiaan (Al-Haj, M, 1995).

Meskipun ada sistem sekolah Arab di Israel, kurikulumnya dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan Israel tanpa otonomi bagi komunitas Arab Palestina. Bahasa Arab digunakan sebagai bahasa pengantar, tetapi sistem ini tetap tidak mengakui keragaman budaya atau kebutuhan khusus dari komunitas Arab. Sejumlah upaya pada 1970-an dan 1980-an untuk memperkenalkan tujuan pendidikan yang serupa bagi sekolah Arab tidak membuahkan hasil. Kurikulum terpisah ini juga diawasi penuh oleh pemerintah Israel, sementara pendidik dan administrator Arab memiliki sedikit otoritas dalam penentuan tujuan dan isi Pendidikan (Mar'i, S. K, 1978).

Maksud dan tujuan pendidikan publik di Israel Meskipun banyak negara menganggap diri mereka sebagai negara demokrasi liberal dengan yurisdiksi atas masyarakat adat dan etnis minoritas, pada kenyataannya mereka baik disengaja atau tidak, ada kecenderungan menuju monokulturalisme dalam desain dan pelaksanaan pendidikan.

Analisis terhadap kebijakan pendidikan Israel menunjukkan bahwa ini adalah pendekatan umum dalam pendidikan publik Israel. Baik sebelum maupun sesudah berdirinya Negara Israel pada tahun 1948, sistem pendidikan swasta Zionis-Yahudi telah dikembangkan di Palestina, dan sistem pendidikan tersebut semakin dikembangkan dan dikembangkan seolah-olah Yahudi adalah satu-satunya bangsa telah terjadi. Undang-undang Pendidikan Nasional Israel tahun 1953 menetapkan tujuan sistem pendidikan sebagai berikut: (1) Pendidikan berdasarkan nilai-nilai budaya Yahudi, pembelajaran, cinta tanah air, kesetiaan kepada negara Yahudi; (2) Praktik pertanian dan kerajinan; (3) Kebebasan, kesetaraan, toleransi, dan mutualitas masyarakat berdasarkan bantuan dan cinta kemanusiaan (<https://www.education.gov.il>, 1953).

Secara umum penulis banyak menjumpai karya-karya yang cenderung membahas tentang perkembangan pendidikan Islam di Mesir di seluruh dunia, khususnya mengenai tahap awal pendidikan pada masa kekuasaan Dinasti Fatimiyah dan tahap modernisasi pendidikan Islam yang dilakukan oleh para reformis.

Bagian terakhir dari "100 Konsep Dasar" untuk kedua sistem sekolah diberi judul "Konsep Demokrasi Israel." Dokumen tersebut mencakup berbagai isu kemanusiaan bagi kedua kelompok (misalnya, hak asasi manusia, Konvensi Jenewa, hak anak, pluralisme, paham kemanusiaan) dan menyebut Israel sebagai "negara Yahudi dan demokratis." seperti mendefinisikan undang-undang sebagai undang-undang dan kembali ke konstitusi. Berlaku). Imigrasi dan hak kembali Yahudi), bendera nasional dan lagu kebangsaan (keduanya merupakan simbol asal usul agama Yahudi). Sistem pendidikan Arab Israel telah, dan terus, ditentukan oleh serangkaian kriteria politik yang tidak dikembangkan oleh orang-orang Arab Palestina. Undang-Undang Pendidikan Negara tahun 1953 menekankan pada pengembangan identitas dan nilai-nilai Yahudi, namun meskipun ada upaya dari komite yang dipimpin oleh para pendidik Yahudi pada tahun 1970an dan 1980an, tujuan serupa tidak ditetapkan untuk pendidikan Arab di dunia Arab (Al-Haj, M,

1995).

Freeland (1996) menekankan bahwa pendidikan multikultural yang sejati memerlukan kontrol penuh masyarakat adat atas pendidikan mereka dan interaksi lintas budaya (Freeland, C, 1996). Di Israel, bahasa Arab sebagai bahasa kedua kerap dihindari karena dianggap mewakili kelompok yang dianggap ancaman. Menurut Direktur Kementerian Pendidikan Israel, *Ronit Tirosh*, ada keengganan dari siswa Yahudi untuk mempelajari bahasa Arab, sehingga wacana menjadikannya pelajaran wajib belum dapat diterapkan.

Pendidikan Islam berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang utuh antara aspek duniawi dan spiritual, serta bertujuan menciptakan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Di tengah era globalisasi, pendidikan Islam harus beradaptasi dengan teknologi sambil menjaga nilai-nilai agama dan mencegah gaya hidup hedonis. Pendidikan karakter berbasis Islam diperlukan sebagai panduan dalam perubahan sosial, dan pendidikan Islam diharapkan tetap relevan dan selaras dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai Islam (Hidayat, A, 2011).

Di wilayah Arab yang dipengaruhi kebijakan Israel, pendidikan Islam menghadapi tantangan aksesibilitas dan kualitas. Kebijakan Israel berpotensi mempengaruhi akses, kurikulum, dan kebebasan akademik dalam pendidikan Islam, sehingga penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap identitas keislaman dan praktik nilai agama di komunitas Arab-Muslim yang berada di bawah kebijakan ini (Safitri, E., et al, 2021).

Pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia yang menyelaraskan aspek duniawi dan spiritual sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan ini menekankan pengembangan kepribadian yang utuh, rasional, dan kritis, terutama dalam era globalisasi dan modernisasi. Dengan kemajuan teknologi dan modernisasi, pendidikan Islam perlu menghindari pengaruh negatif seperti hedonisme dan materialisme. Internalisasi pendidikan karakter melalui nilai-nilai Islam menjadi dasar untuk kebangkitan sosial (Hidayat, A, 2011).

Dalam konteks kebijakan pendidikan, Islam menyesuaikan pengembangan kurikulum dengan nilai-nilai Al-Quran dan Hadits. Tantangan pendidikan Islam di negara-negara Arab adalah pengaruh kebijakan Israel yang dapat membatasi akses, kualitas, dan kebebasan akademik. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi identitas dan penerapan nilai-nilai Islam dalam pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam harus sejalan dengan pengembangan jangka panjang, yang tetap menjaga esensi ajaran Islam dalam pendidikan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur, yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam, Metode ini dipilih untuk menganalisis berbagai literatur akademik, kebijakan Pendidikan, dan

untuk menganalisis sistem dan kebijakan Israel dalam pendidikan agama Islam Arab-Muslim. Melalui studi literatur ini peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber-sumber tertulis meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional terakreditasi, buku, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian yang relevan dengan topik yang di kaji. Sumber-sumber tersebut dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai karakteristik sistem dan kebijakan Israel dalam pendidikan agama Islam Arab-Muslim. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara analisis-deskriptif untuk merinci karakteristik sistem dan kebijakan Israel dalam pendidikan agama Islam Arab-Muslim seperti kurikulum pendidikan Islam, pendekatan pengajaran, dan aspek-aspek yang mendukung pembelajaran agama Islam di sekolah-sekolah di Israel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pendidikan Israel

Sistem pendidikan di Israel memiliki empat jenis sekolah utama: sekolah negeri, sekolah negeri agama Yahudi, sekolah Arab, dan sekolah swasta. Sistem ini mencerminkan masyarakat multikultural Israel yang terdiri dari mayoritas Yahudi serta minoritas Arab-Muslim dan Arab-Kristen, Pendidikan wajib di Israel berlaku mulai usia 6 hingga 18 tahun, dan sistem pendidikan berjenjang dari sekolah dasar hingga sekolah menengah. Meskipun demikian, disparitas dalam pendanaan dan fasilitas masih menimbulkan ketidak setaraan antara sekolah Arab dan sekolah Yahudi. Misalnya, anggaran untuk sekolah Arab sering kali lebih rendah, sehingga mempengaruhi kualitas pengajaran, fasilitas, dan dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Selain itu, siswa Arab-Israel juga mengalami tantangan untuk memasuki perguruan tinggi dan universitas, baik di Israel maupun di luar negeri, karena perbedaan kurikulum yang dipelajari selama sekolah (Abu-Asbah, Khalil & Avishai, Osnat, 2017).

Sistem pendidikan Israel mencerminkan keragaman budaya, agama, dan bahasa di negara tersebut, mencakup kelompok etnis dan agama yang beragam. Hal ini menimbulkan tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan identitas-identitas tersebut dalam lingkungan pendidikan yang inklusif. Untuk memahami sistem pendidikan Israel, penting untuk melihat struktur, kurikulum, tantangan, dan inovasi dalam konteks sosial-politik yang kompleks.

Struktur Pendidikan Israel terdiri dari beberapa jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi. Pendidikan prasekolah bersifat opsional, sementara pendidikan dasar (untuk usia 6-16 tahun) adalah wajib dan meliputi pelajaran seperti matematika, bahasa, sejarah, sains, dan agama. Pada pendidikan menengah atas, siswa diarahkan untuk memilih program studi sesuai minat dan persiapan menuju universitas.

Kebijakan Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel

Pendidikan bagi komunitas Arab-Muslim di Israel adalah bagian dari sistem pendidikan nasional tetapi dengan kebijakan dan kurikulum yang dirancang khusus

untuk memenuhi kebutuhan budaya, bahasa, dan agama mereka (Arar, K, 2012 : 113-145). Pemerintah Israel menyediakan kurikulum yang menekankan pelajaran dalam bahasa Arab serta mata pelajaran khusus yang mencakup bahasa Arab, sejarah Arab, dan pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah ini mencakup pelajaran Al-Qur'an, hadits, serta sejarah dan budaya Islam, yang bertujuan memperkuat identitas keagamaan dan budaya Arab-Muslim.

Struktur Kurikulum: Sistem ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, dari pendidikan dasar hingga menengah atas, dengan kurikulum yang mencakup bahasa Arab sebagai bahasa utama, di samping bahasa Ibrani dan Inggris. Selain itu, sejarah Arab dan studi Islam disajikan untuk memberikan siswa pemahaman mengenai latar belakang budaya dan sejarah mereka. Meski begitu, beberapa materi yang diajarkan bisa berbeda dalam penekanan, tergantung pada kebijakan pendidikan nasional dan pengaturan khusus di sekolah-sekolah Arab (Al-Haj, M. 1995).

Tantangan dalam Pelaksanaan: Pendidikan untuk komunitas Arab-Muslim di Israel sering menghadapi tantangan terkait ketimpangan dalam akses dan kualitas pendidikan jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah Yahudi. Faktor-faktor seperti keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur, dan disparitas dalam pelatihan guru sering menjadi kendala dalam sistem pendidikan Arab-Muslim (Jabareen, Y., & Agbaria, A, 2014 : 8-28). Selain itu, dalam beberapa kasus, adanya perbedaan pandangan terkait kurikulum agama dan sejarah memengaruhi keselarasan kurikulum dengan identitas dan aspirasi komunitas Arab-Muslim di Israel.

Pendidikan bagi komunitas Muslim Arab di Israel mencerminkan keragaman budaya dan agama, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan yang kompleks akibat perbedaan politik, sosial, dan identitas. Kebijakan pendidikan untuk komunitas ini menghadapi beberapa kendala utama, antara lain diskriminasi, ketimpangan sumber daya, dan relevansi kurikulum, sehingga pendidikan Islam di Israel tidak bisa berkembang dan menyebar secara luas. Akibat diskriminasi yang terjadi sistem Pendidikan Islam di Israel tidak bisa berjalan dengan efektif sehingga bisa merubah keadaan masyarakat di negara Israel. Dalam menjalankan Pendidikan Islam di Israel memiliki beberapa tantangan yang besar di antaranya:

Tantangan Utama:

- 1. Diskriminasi dan Ketimpangan Sumber Daya:** Sekolah-sekolah Muslim Arab sering kali kekurangan sumber daya yang dibutuhkan, termasuk fasilitas, buku, dan tenaga pendidik yang memadai, yang menghambat proses belajar-mengajar. Akibat diskriminasi ini Pendidikan Islam di Israel tidak bisa berkembang karena pemerintahan sangat membatasi segala fasilitas dan kegiatan yang berkaitan dengan Pendidikan Islam.
- 2. Relevansi Kurikulum:** Kurikulum pendidikan Islam dianggap kurang relevan dalam memenuhi kebutuhan siswa di dunia modern, terutama dalam memadukan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kurikulum mereka lebih mengedepankan pengetahuan umum dibandingkan

pengetahuan agama. Dalam kurikulum di Israel lebih mengedepankan pendidikan sains, teknologi, sosial dan matematika. Mereka beranggapan pendidikan ini lebih utama dalam membangun dan mempertahankan negara.

3. **Ketegangan Politik dan Sosial:** Konflik antara Israel dan Palestina menciptakan ketegangan sosial yang berdampak pada pendidikan, membuat lingkungan sekolah bagi siswa Muslim Arab menjadi lebih menantang. Ketegangan ini tidak hanya berdampak pada aspek pendidikan dan keamanan, tetapi juga merambah ke bidang kehidupan sehari-hari. Bagi siswa yang beragama Islam, lingkungan sekolah sering kali menjadi cerminan dari ketidakstabilan yang ada di masyarakat luas. Ketegangan ini membuat pendidikan mereka menjadi lebih menantang, baik dari segi fisik maupun psikologis. Siswa Muslim harus benar-benar bisa menghadapi tantangan-tantangan ini sembari berusaha meraih pendidikan yang layak, walaupun dengan daya dukungan yang terbatas.
4. **Ketimpangan Akses Pendidikan Tinggi:** Akses terhadap pendidikan tinggi bagi individu Muslim sering kali terbatas oleh berbagai faktor yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah di Israel. Hal ini menciptakan ketimpangan signifikan antara kelompok etnis dan agama (Abu-Lughod, Lila, 2013). Sehingga hilang kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi dan pada akhirnya, prospek kehidupan yang lebih baik sangat sulit bagi orang-orang muslim yang ada.
5. **Realitas Kebijakan Pendidikan:** Kurikulum bagi siswa Muslim mencakup pelajaran agama Islam, sejarah Arab-Islam, dan budaya lokal, dengan upaya untuk mempertahankan keragaman budaya. Pemerintah Israel juga berupaya meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan khusus untuk mata pelajaran Islam dan bahasa Arab. Selain itu, ada inisiatif untuk menciptakan lingkungan inklusif bagi siswa berkebutuhan khusus dan untuk mempromosikan dialog antaragama guna meningkatkan toleransi.

Prospek Masa Depan:

1. **Kesetaraan Akses:** Memperluas akses pendidikan yang setara menjadi prioritas, dengan upaya mengalokasikan lebih banyak sumber daya dan fasilitas bagi sekolah-sekolah Arab-Muslim. Salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah kesenjangan akses pendidikan antara komunitas Yahudi dan komunitas Arab-Muslim. Meskipun terdapat upaya pemerintah dan lembaga swasta untuk mengatasi perbedaan ini, tantangan yang ada masih sangat signifikan (Abu Asbah, Khalil, 2007). Pendidikan bagi komunitas Arab-Muslim di Israel sering kali dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, seperti infrastruktur yang kurang memadai, fasilitas pendidikan yang terbatas, serta kurangnya guru yang terlatih. Sekolah-sekolah di wilayah Arab biasanya menerima alokasi anggaran yang lebih rendah dibandingkan sekolah-sekolah di wilayah Yahudi. Hal ini berdampak pada kualitas pengajaran, akses ke teknologi

modern, dan program ekstrakurikuler yang mendukung pengembangan siswa secara menyeluruh.

2. **Inovasi Kurikulum:** Tantangan dalam pengembangan kurikulum adalah memastikan nilai-nilai Islam terintegrasi dengan keterampilan abad ke-21, menciptakan kurikulum yang lebih dinamis dan sesuai dengan kebutuhan modern (Sulayman, N, 2017: 125-146). Penciptaan kurikulum yang dinamis dan sesuai dengan kebutuhan modern memerlukan pendekatan yang holistik, di mana nilai-nilai spiritual dan moral dapat berjalan beriringan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam proses ini, tantangan yang muncul mencakup ketersediaan sumber daya, pelatihan guru yang mumpuni, dan resistensi dari sebagian masyarakat yang mungkin mengkhawatirkan pengaruh modernitas terhadap praktik keagamaan. Namun, berbagai negara dan lembaga pendidikan telah mulai melakukan inisiatif untuk mengembangkan model kurikulum hibrida yang menggabungkan kedua aspek ini demi menciptakan generasi yang berpengetahuan luas dan berakar kuat pada nilai-nilai agama mereka.
3. **Kerja sama Antarpemangku Kepentingan:** Partisipasi aktif pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan pemimpin agama menjadi kunci untuk kebijakan pendidikan yang inklusif. Partisipasi aktif semua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan mencakup kebutuhan dan aspirasi dari beragam kelompok etnis dan agama, seperti komunitas Arab-Muslim. Pemerintah memiliki peran dalam menyediakan regulasi dan pendanaan, sementara lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menerapkan kurikulum yang adil dan menyeluruh. Masyarakat, termasuk para orang tua, dapat memberikan dukungan dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pendidikan. Di sisi lain, pemimpin agama memiliki peran strategis dalam menjembatani nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan pendidikan modern, sehingga mendorong penerimaan kurikulum yang lebih luas. Melalui sinergi ini, tantangan-tantangan seperti ketimpangan akses, kualitas pendidikan, dan kesenjangan sosial dapat diatasi dengan lebih efektif.
4. **Pengembangan Siswa:** Fokus pada keterampilan kritis dan sosial menjadi penting untuk mempersiapkan siswa muslim menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi kepada masyarakat, sehingga masyarakat muslim bisa lebih berkembang dan tidak terdiskriminasi lagi oleh orang-orang yahudi sehingga bisa terbebas dan maju dalam segala hal yang bisa lebih maju lagi dari semua sektor yang ada. Upaya berkelanjutan untuk meningkatkan pendidikan Muslim Arab di Israel diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, toleran, dan progresif, dengan pendidikan yang inklusif untuk semua kalangan.

Dampak dari Kebijakan Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel terhadap Masyarakatnya

Kebijakan pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel memiliki dampak yang kompleks dan signifikan terhadap masyarakatnya (Sulayman, N, 2017 : 125-146).

Sebagai bagian integral dari identitas budaya dan agama sebagian besar warga Israel, pendidikan Islam Arab-Muslim memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia, nilai-nilai, dan hubungan antarkomunitas di negara tersebut.

Salah satu dampak utama dari kebijakan pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel adalah penguatan identitas budaya dan agama di kalangan masyarakat Arab-Israel. Melalui kurikulum yang menekankan ajaran Islam, sejarah Arab, dan nilai-nilai kemanusiaan, pendidikan ini membantu mempertahankan warisan budaya dan agama yang kaya dalam komunitas Arab-Israel. Hal ini juga dapat memperkuat rasa solidaritas dan kebanggaan etnis di tengah tekanan integrasi ke dalam masyarakat Israel yang mayoritas Yahudi (Khalidi, R. 2013).

Selain itu, pendidikan Islam Arab-Muslim juga dapat memengaruhi persepsi dan hubungan antarkelompok di Israel. Dengan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan agama Arab-Muslim, pendidikan ini dapat berpotensi memperkuat dialog lintas budaya dan toleransi antarkomunitas di tengah konflik yang kompleks. Namun, di sisi lain, pengajaran yang terfokus pada identitas Islam Arab-Muslim juga dapat memperdalam kesenjangan antara komunitas Arab dan Yahudi di Israel, menciptakan tantangan dalam upaya mencapai rekonsiliasi dan kesatuan nasional.

Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel memiliki dampak yang kompleks dan beragam terhadap masyarakatnya. Dengan memperkuat identitas budaya dan agama, memengaruhi hubungan antarkelompok, dan memengaruhi kesetaraan pendidikan, pendidikan ini memainkan peran kunci dalam dinamika sosial dan politik di negara tersebut. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampak positif dan negatif dari kebijakan ini guna mempromosikan inklusi, toleransi, dan kesetaraan di tengah keragaman masyarakat Israel.

Kebijakan Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel Memengaruhi Hubungan Antarkomunitas di Negara

Pendidikan Islam bagi umat Islam Arab di Israel berperan penting dalam dinamika hubungan antarkomunitas di negara tersebut. Sebagai bagian integral dari masyarakat Israel, pendidikan Arab dan Islam mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara kelompok berinteraksi di negara tersebut. Pertama, pendidikan Islam bagi Muslim Arab di Israel berperan penting dalam memperkuat identitas budaya dan kesadaran Muslim Arab dalam masyarakat yang beragam. Melalui kurikulum Islam, nilai-nilai dan tradisi yang diajarkan dalam pelatihan ini, generasi muda Muslim Arab akan mampu dengan bangga menjunjung tinggi warisan budaya dan agamanya.

Hal ini dapat memperkuat rasa solidaritas dan persatuan di antara komunitas Arab-Muslim Israel dan mempererat hubungan dalam negeri. Di sisi lain, pendidikan Islam bagi umat Islam Arab juga dapat menjadi sumber konflik dan ketegangan antarmasyarakat di Israel. Dalam konteks politik yang kompleks, isu-isu seperti kepemilikan tanah, hak asasi manusia, dan konflik sejarah antara orang Arab

dan Israel sering kali tercermin dalam kurikulum pendidikan Islam Arab-Muslim (Al-Haj, M, 1995). Hal ini dapat meningkatkan polarisasi antarmasyarakat dan memperburuk hubungan antarkelompok dalam suatu negara.

Lebih lanjut, pendidikan Islam bagi Muslim Arab di Israel juga berpotensi membangun jembatan dialog antarkomunitas. Dengan pendekatan pendidikan yang inklusif dan beragam, lembaga pendidikan Arab-Islam dapat memainkan peran penting dalam mendorong saling pengertian, toleransi, dan perdamaian antarkelompok dalam suatu negara. Melalui pendidikan, generasi muda dapat diajarkan untuk menghargai perbedaan dan bekerja sama melintasi batas etnis dan agama. Secara keseluruhan, pendidikan Islam di kalangan Muslim Arab di Israel mempunyai dampak yang kompleks dan beragam terhadap hubungan antarkomunitas di negara tersebut. Dengan pendekatannya yang bijaksana dan inklusif, pendidikan ini berpotensi memperkuat persatuan dalam keberagaman masyarakat Israel, mendorong dialog antarkelompok, dan mendorong perdamaian dan kerja sama.

Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel Memengaruhi Integrasi Antarkomunitas di Negara

Pendidikan Islam bagi umat Islam Arab di Israel memainkan peran strategis dalam membangun pemahaman dan toleransi antarkomunitas yang beragam di negara tersebut. Dengan memasukkan nilai-nilai saling menghormati, kerja sama, dan toleransi antarbudaya ke dalam kurikulum, pendidikan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif dan kolaboratif. Hal ini membantu generasi muda melihat perbedaan sebagai kekayaan, bukan hambatan, sehingga memperkuat kohesi sosial.

Pendidikan Islam juga berfungsi untuk memperkuat identitas budaya dan agama komunitas Arab-Muslim di Israel, membantu mereka merasa lebih percaya diri dan terhubung dengan akar tradisi mereka. Dengan demikian, pendidikan ini tidak hanya mempererat integrasi antarkomunitas tetapi juga membuka pintu dialog lintas budaya.

Artikel terkait konflik Palestina-Israel menunjukkan bagaimana perbedaan ideologi, keyakinan, dan etnisitas memengaruhi komunikasi dan memperumit penyelesaian konflik. Dinamika konflik ini ditandai oleh *etnosentrisme*, *stereotip*, dan hambatan komunikasi yang memperburuk prasangka. Penyelesaian konflik membutuhkan pemahaman hak asasi manusia dan peran mediator yang adil, dengan fokus pada pengembalian hak yang dirampas.

Pendekatan Kompleks terhadap Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel memiliki beberapa implikasi:

1. Ketidakjelasan dan Ketidakpastian

Pendekatan kompleks menciptakan ketidakjelasan dan ketidakpastian bagi siswa, guru, dan masyarakat. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami tujuan dan arah pendidikan yang dilaksanakan sehingga sulit untuk mencapai dari suatu tujuan pendidikan Islam.

2. Kesulitan dalam Implementasi Kebijakan

Kompleksitas pendekatan dapat mempersulit implementasi kebijakan pendidikan yang efektif. Kurangnya kejelasan dan konsensus dapat menyebabkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan dalam penerapan kebijakan di berbagai wilayah.

3. Persepsi Negatif:

Pendekatan kompleks dapat memicu persepsi negatif di kalangan siswa dan masyarakat Arab-Muslim, yang merasa bahwa sistem pendidikan tidak sepenuhnya adil atau mendukung identitas mereka sehingga mereka cenderung sulit untuk berkembang dalam menjalankan pendidikan Islam.

4. Kesenjangan Pendidikan

Kompleksitas dapat memperburuk kesenjangan pendidikan antara siswa Arab-Muslim dan siswa non-Arab di Israel. Kurangnya sumber daya dan aksesibilitas yang merata dapat memperlebar kesenjangan antara siswa muslim dan nonmuslim.

5. Ketegangan Sosial

Kompleksitas pendekatan dapat memperburuk ketegangan sosial antara masyarakat Arab-Muslim dan Israel. Kurangnya kepercayaan dan rasa keadilan dapat memicu konflik dan ketidakstabilan hubungan antara masyarakat muslim dan non muslim yang menjadikan hubungan keduanya sulit untuk bersatu.

6. Keterbatasan Pengembangan Kurikulum

Kompleksitas dapat membatasi pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai dan budaya Arab-Muslim. Kurangnya kebebasan akademik dan kontrol atas kurikulum dapat menghambat pengembangan pendidikan yang inklusif.

7. Kesulitan dalam Evaluasi:

Kompleksitas pendekatan dapat mempersulit proses evaluasi dan monitoring sistem pendidikan. Kurangnya metrik dan standar yang jelas dapat menghambat pengukuran efektivitas kebijakan.

8. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kompleksitas dapat menghambat partisipasi aktif masyarakat Arab-Muslim dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Kurangnya keterlibatan dan dialog dapat menyebabkan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

9. Peran Politik

Kompleksitas pendekatan dapat memperkuat peran politik dalam pendidikan. Kurangnya kesepakatan dan konsensus dapat membuka peluang untuk manipulasi politik dan kepentingan pribadi sehingga sulitnya kemajuan dalam pendidikan Islam di Israel.

10. Tantangan bagi Masa Depan

Pendekatan kompleks dapat menimbulkan tantangan bagi masa depan pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel. Kurangnya kestabilan dan kepercayaan

dapat menghambat pengembangan sistem pendidikan yang adil dan berkelanjutan.

Pendekatan Kompleks Ini Memengaruhi Interaksi antara Pendidikan Islam dan Budaya Israel

Pendekatan kompleks dalam interaksi antara pendidikan Islam dan budaya Israel memengaruhi berbagai aspek penting, seperti pemahaman, toleransi, dan adaptasi. Dalam konteks yang penuh tantangan ini, penting untuk menghormati perbedaan sejarah, nilai, dan keyakinan kedua entitas sambil membangun sikap inklusif dan toleran. Pemahaman yang mendalam dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan sosial serta budaya dapat menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif.

Di Indonesia, pendidikan Islam didukung oleh landasan hukum yang kuat, seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan pemerintah yang mengatur standar nasional pendidikan. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses dan mutu pendidikan Islam dalam kerangka sistem pendidikan nasional, baik di lembaga umum maupun agama. Dengan regulasi ini, pendidikan Islam terus berkembang, relevan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, baik di Israel maupun di Indonesia, kolaborasi, dialog, dan pemahaman terhadap perbedaan adalah kunci untuk menciptakan masa depan pendidikan yang lebih cerah dan harmonis.

Tantangan yang Dihadapi oleh Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel

Pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel menghadapi beberapa tantangan yang kompleks. Salah satu tantangannya adalah kurangnya sumber daya dan dukungan pemerintah untuk sekolah-sekolah Islam. Hal ini dapat mempengaruhi ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai dan standar pengajaran yang tinggi.

Selain itu, masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan juga menjadi permasalahan serius dalam pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel. Ada kesenjangan dalam akses ke pendidikan yang berkualitas antara siswa Arab-Muslim dan non-Muslim di Israel. Ini dapat menyebabkan ketidakadilan pendidikan dan peluang yang memengaruhi perkembangan akademik dan sosial siswa. Selain itu, isu politik dan konflik di Timur Tengah juga dapat memengaruhi lingkungan pendidikan di Israel, termasuk pendidikan Islam Arab-Muslim. Ketegangan politik dan konflik regional dapat menciptakan ketegangan sosial yang berdampak negatif pada lingkungan pendidikan dan kesejahteraan siswa. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk memperjuangkan kesetaraan pendidikan, memperjuangkan sumber daya yang cukup, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa, tanpa memandang latar belakang agama atau etnis (Nabilah, 2023 : 107-113).

KESIMPULAN

Dari analisis sistem dan kebijakan Israel dalam pendidikan Islam Arab-Muslim, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara keduanya sangat kompleks dan penuh dengan tantangan. Sistem pendidikan dan kebijakan Israel memiliki dampak yang signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam Arab-Muslim di wilayah tersebut. Melalui pendekatan, kurikulum, dan sumber daya pendidikan yang disediakan oleh pemerintah Israel dapat mempengaruhi cara pendidikan Islam. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Israel dalam konteks pendidikan dapat menjadi hambatan bagi pengembangan pendidikan Islam Arab-Muslim. Pembatasan akses, kontrol terhadap kurikulum, dan diskriminasi terhadap komunitas Arab-Muslim dapat mempengaruhi kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat muslim.

Sistem pendidikan di Israel mencerminkan keragaman masyarakatnya yang multikultural, namun menghadapi tantangan signifikan terutama dalam pendidikan untuk komunitas Arab-Muslim. Ada beberapa poin penting dalam tantangan pendidikan Arab-Muslim di Israel yaitu: *Pertama*, struktur dan jenis sekolah yaitu terdapat empat jenis sekolah utama: sekolah negeri, sekolah negeri agama Yahudi, sekolah Arab, dan sekolah swasta. Pendidikan wajib berlaku dari usia 6 hingga 18 tahun. *Kedua*, ketimpangan akses dan kualitas yaitu sekolah Arab menghadapi ketimpangan anggaran, fasilitas, dan sumber daya dibandingkan sekolah Yahudi. Ini mempengaruhi kualitas pendidikan masyarakat muslim. Karena pendidikan Islam Arab-Muslim di Israel merupakan aspek penting dalam membentuk identitas dan hubungan antar komunitas. Namun, diskriminasi, ketimpangan, dan konflik politik menjadi tantangan besar. Dengan pendekatan inklusif, kolaborasi lintas kelompok, dan kebijakan yang mendukung, pendidikan ini memiliki potensi untuk memperkuat toleransi, sosial, dan kesetaraan di masyarakat Israel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Asbah., Khalil., & Avishai, Osnat. (2017). Equity and Education in Israel: Arab-Jewish Divides. *Neliti Journal*.
- Adwan, Sami. (2001). Education and Identity: The Role of School Curriculum in Shaping National Identity in Israel. *Comparative Education Review*, 45(3), 333-358.
- Ahmadi, A., & El Widdah, M. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Islam (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Pendidikan). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 4(1), 104-113.
- Alda, A., Putra, W. S., & Sari, A. P. (2023). Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2), 679-687.
- Al-Haj, M. (1995). Education, Empowerment, and Control: The Case of the Arabs in Israel. Albany: State University of New York Press.
- Alim, M., Akbar, A., & Muttaqin, M. I. (2023). Nilai Toleransi pada Bingkai Kebijakan Dalam dan Luar Negeri UAE. *Jurnal ICMES*, 7(2), 221-233.
- Anonim. (2008). Extreme Measures: Jewish Settler Violence in Israel and the

- Occupied Territories. *Human Rights Watch*. www.hrw.org.
- Anonim. (2018, 19 Juli). Israel Passes 'Nation-State' Law, Enshrining Jewish National Identity. *BBC News*. www.bbc.com.
- Arar, K. (2012). Israeli Education Policy Since 1948 and the State of Arab Education in Israel. *Italian Journal of Sociology of Education*, 1, 113-145.
- Armstrong, Karen. (1993). *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*. Ballantine Books.
- Aslan, Reza. (2005). *No God but God: "The Origins, Evolution, and Future of Islam"*. Random House.
- Aulia, V. I., & Anggraeni, W. (2023). Urgensi Pembelajaran Bahasa Arab dalam Pendidikan Islam. *Uktub: Journal of Arabic Studies*, 3(1), 22-40.
- Azizah, D. N. (n.d.). Kajian terhadap Fundamental Agreement Between Holy See And The State Of Israel 1993 dalam Hal Kebebasan Beragama di Israel. *BELLI AC PACIS (Jurnal Hukum Internasional)*, 8(2), 81-89.
- Efendi, N., & Sholeh, M. I. (2023). Dinamika Sosial dalam Proses Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 14(2), 45-67.
- Fitria, N. (2023). Kajian Prinsip Dasar Manajemen Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 6(8), 6116-6124.
- Heriamsal, K., & Manurung, F. B. (2024). Strategi Diplomasi Indonesia dalam Upaya Mewujudkan Perdamaian pada Konflik Terbaru Hamas-Israel. *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 9(1), 19-48.
- Hidayat, N. (2011). Prespektif Islam tentang Strategi Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 12(1).
- Hindarsyah, E. W., & Nazir, N. (2024). Analisis Kebijakan Pendidikan Berdasarkan Aspek Sarana dan Prasarana. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(03), 62-71.
- Johnson, Paul. (1987). *"A History of the Jews"*. Harper Perennial.
- Khalidi, Rashid. (2020). *The Hundred Years' War on Palestine: A History of Settler Colonialism and Resistance, 1917-2017*. Metropolitan Books.
- Khumaini, F., Yulia, N. M., & Efendi, M. Y. (2023). Strategi Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia Era Society 5.0 di Madrasah. *Al-Fahim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(2), 121-138.
- Maarif, Z. (2023). *Filsafat Jalur Perpustakaan Hassan Hanafi*. Jalur Perpustakaan.
- Makalao, DAM., & Irawan, I. (2023). Analisis Metode Penelitian Kuantitatif dalam Manajemen Pendidikan Islam. *Administrasi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 11(2), 152-175.
- Mar'i, S. K. (1978). *Arab Education in Israel*. Syracuse University Press.
- Masalha, Nur. (1997). *A Land Without a People: Israel, Transfer and the Palestinians 1949-1996*. Faber & Faber.
- Ministry of Education. (n.d.). "National Education Law, 1953," *Israeli Ministry of Education*, diakses <https://www.education.gov.il>
- Munthe, H., & Dahlan, Z. (2024). Panggung Geografis Peradaban Islam. *Integrasi:*

Jurnal Studi Islam dan Humaniora, 2(1), 73-91.

- Muslim, H. U. (2023). Manajemen Kurikulum Merdeka Belajar pada Lembaga Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 65-70.
- Nabilah, N., & Wijayanti, R. (2022). Kekejaman Israel terhadap Rakyat Palestina: Telaah Berita-Berita CNN Indonesia Tahun 2019-2021. *Dinamika Sosial: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 58-80.
- Nadila, DDN. (2023). Evaluasi Kebijakan Kurikulum Mandiri Menggunakan Model WILLIAM DUNN. *Jurnal Pendidikan Sang Surya*, 9(1), 107-113.
- Namsa, Y. (2024). *Analisis Strategi Manajemen Pendidikan pada Dewan Pendidikan Islam (Studi Kasus di MAN Langgur Maluku Tenggara)*. (Disertasi Doktor, IAIN Ambon).
- OIC's Role in Supporting Palestine," *Organization of Islamic Cooperation OIC's Role in Supporting Palestine*, " *Organization of Islamic Cooperation* , <https://www.oic-oci.org>.
- Pew Research Center. (2021). "Global Attitudes Survey on Israeli-Palestinian Conflict".
- Rifky, S., Devi, S., Hasanah, U., & Safii, M. (2024). Analisis Strategi Manajemen Pendidikan Menggunakan School Based Management terhadap Dinamika Pendidikan Formal. *Journal on Education*, 6(2), 15086-15098.
- Safitri, E., et al. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pendidikan terhadap Pendidikan Islam*.
- Safitri, U., Nuarizal, A., dan Gistituati, N. (2021). Urgensi analisis kebijakan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1).
- Sassi, Komarudin., & Azzahra, H. (n.d.) 2023. A Comparative Study of the Complexity of Sacred Values of the World's Religions: A Multidisciplinary Perspective. 10(2), 175-200. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/issue/view/1888>.
- Sassi, Komarudin., & Haramain Azzahra. (2023). A Comparative Study of the Complexity of Sacred Values of the World's Religions: A Multidisciplinary Perspective. 10(2), 175-200. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ilmu-ushuluddin/issue/view/1888>.
- Soyomukti, N. (2024). *Ben Ali, Mubarak, Gaddafi* . Nuansa Ilmiah.
- Spoerl, Joseph S. (n.d.). The Vatican-Israel Accord: A Breakthrough in Catholic-Jewish Relations
- Suherni, E. S., Zohriah, A., & Bachtiar, M. (2023). Peran Kepemimpinan dalam Lembaga Pendidikan pada Kajian Manajemen Pendidikan Islam. *Journal on Education*, 6(1), 2515-2522.
- The Fundamental Agreement Between the Holy See and the State of Israel," 1993, tersedia di [arsip diplomatik Takhta Suci dan pemerintah Israel](#)
- United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), "Gaza Escalation, 2021: Humanitarian Impact Update," 2021, www.unocha.org.
- World Bank. (2021). "Damage and Needs Assessment Report: Gaza"